

Politik Identitas dan Jejaring Politik Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012

Didin Sabarudin

Didin Sabarudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra
Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Kebangsaan

Email: didin3mdi@gmail.com

Abstrak

Perubahan pola pemerintahan yang sentralistis menjadi desentralistis membawa pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah, termasuk pula perluasan kewenangan politik di tingkat lokal. Semangat demokratisasi yang terjadi pasca kepemimpinan Orde Baru memunculkan dampak ikutan berupa desentralisasi dengan diberlakukannya UU No.22/2001 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU 12/2008. Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kebangkitan politik identitas di aras politik lokal. Kondisi tersebut terjadi di kota metropolitan Jakarta, dimana sebagai ibukota negara didiami oleh penduduk yang berasal dari beragam identitas. Realitasnya, mobilisasi berbasis identitas diaktualisasikan oleh pasangan calon gubernur yang berkompetisi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 terutama terlihat nyata pada putaran kedua antara petahana gubernur Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli (Foke – Nara) berasal dari identitas etnis Betawi melawan pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi – Ahok) yang merupakan perpaduan identitas etnis Jawa berasal dari Solo dan etnis Tiong Hoa berasal dari Belitung Timur, Sumatera. Dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi politik melalui jejaring sosial pun dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan para relawan yang bekerja untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat DKI Jakarta dalam memenangkan pertarungan memperebutkan kursi DKI 1.

Kata Kunci: Politik Identitas, Jejaring Politik, Pemilihan Gubernur

Pendahuluan

Keanekaragaman etnis di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perilaku politik di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari awal mula pergerakan kemerdekaan menentang penjajahan Belanda yang dipelopori oleh berbagai organisasi kepemudaan dengan didasarkan pada kesamaan etnis, agama, dan daerah tempat kelahiran. Sumpah Pemuda 1928 menjadi titik balik dalam pergerakan kemerdekaan, dimana sejak saat itu identitas etnis, agama dan kedaerahan tidak lagi sebagai identitas politik perjuangan, namun berdasarkan penyatuan identitas yang beragam menjadi identitas politik kebangsaan, yaitu: Bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme tersebut melintasi batas-batas etnisitas, yang disebut oleh Reid (2001) sebagai ‘*civic nationalism*’.

Meskipun Indonesia tumbuh sebagai bangsa dengan mengikrarkan semangat kebangsaan yang sangat kuat untuk meninggalkan identitas etnik dari masing-masing kelompok masyarakat, bukan berarti etnisitas hilang begitu saja dari kehidupan politik di Indonesia. Dengan modal *civic* nasionalisme tersebut yang berhasil mengatasi batas-batas sempit dari sekat-sekat etnis maupun agama, identitas etnik dari kelompok-kelompok masyarakat tetap melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia, karena apa yang disebut oleh Geertz (1973) sebagai primordial merujuk pada anggapan bahwa etnisitas adalah sebuah identitas yang melekat dibawa oleh seseorang sejak lahir. Meskipun semua adalah orang Indonesia, tetapi masing-masing tetap memiliki identitas primordialnya sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, Makasar, Minang, Melayu, Aceh, Dayak, Bali, Ambon, Papua dan sebagainya (Biro Pusat Statistik mengelompokkan penduduk Indonesia ke lebih dari seribu suku bangsa dalam sensus penduduk tahun 2000).

Identitas primordial, seperti etnisitas, bahasa daerah, dan agama bisa saja berubah atau bergeser, bersifat *fluid* (cair) dan situasional bila konteks sosialnya berubah, karenanya merupakan sesuatu yang bisa dikonstruksi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Identitas etnik memiliki batas-batas yang membuatnya berbeda dengan etnis-etnis lainnya, dimana batas-batas inilah yang dapat digeser-geser (*shifting identity*) sesuai dengan situasi dan konteksnya menjadi sesuatu yang dapat dinegosiasikan (Hall, 1996, Varshney, 2003 dan Varshney et al. 2004).

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, etnisitas sering menjadi suatu hal yang cenderung tetap, tidak berubah dan bersifat strategis, dimana para kandidat yang bertarung memperebutkan jabatan politik melakukan mobilisasi etnik (*ethnic mobilization*) dengan menggunakan simbol-simbol identitas etnis untuk bisa menarik simpati dari orang-orang yang merasa memiliki atau dekat dengan identitas etnis para kandidat tersebut, seperti diungkapkan oleh Castells (2010:421)

“... *thus on the other hand the dominant global elites inhabiting..., while on the other hand people resisting economic, cultural and political disfranchisement tend to be attracted to communal identity.*”

Bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Orde Baru, memunculkan kembali gerakan kedaerahan dengan mengambil *setting* politik etnisitas yang merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan, disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Menguatnya politik identitas memperoleh legitimasi melalui politik

desentralisasi yang memberikan kekuasaan dan kewenangan oleh pusat kepada daerah pasca pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004. Konsekuensi dari itu, maka sejak 1 juni 2005 kedaulatan rakyat dikembalikan dengan memberi peluang kepada rakyat menggunakan hak pilihnya secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemberian kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, tidak saja menimbulkan persaingan antar elit dan pemimpin lokal dalam memperebutkan jabatan politik melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, tetapi juga kondisi tersebut melahirkan sikap anti pendatang yang menguatkan justifikasi dan dukungan terhadap gejala isu putra daerah, sehingga pemilihan kepala daerah dapat melahirkan konsolidasi etnis dan agama, tetapi bisa juga menjadi sumber konflik (Lay, 2006:33).

Demikian pula dengan jejaring politik memainkan peran vital dalam perkembangan politik di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, dimana jejaring menekankan bagaimana warga negara menerima dan menginterpretasikan informasi tentang politik, seperti yang diungkapkan oleh Heaney & McClurg (2009; 729-730), "*especially applications pertaining to the flow of information, coordination, cooperation or trust, informal organization, and multiple levels of organization.*"

Informasi bagi pemilih tentang cagub dan cawagub muncul dari berbagai sumber sebelum pelaksanaan pemilihan gubernur. Dalam keterbukaan era informasi dan teknologi, para cagub dan cawagub menggunakan berbagai macam sumber multi dimensional jejaring komunikasi, seperti jejaring media dan internet yang membawa informasi

kepada ruang keluarga para pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka pada saat pelaksanaan pencoblosan di bilik suara.

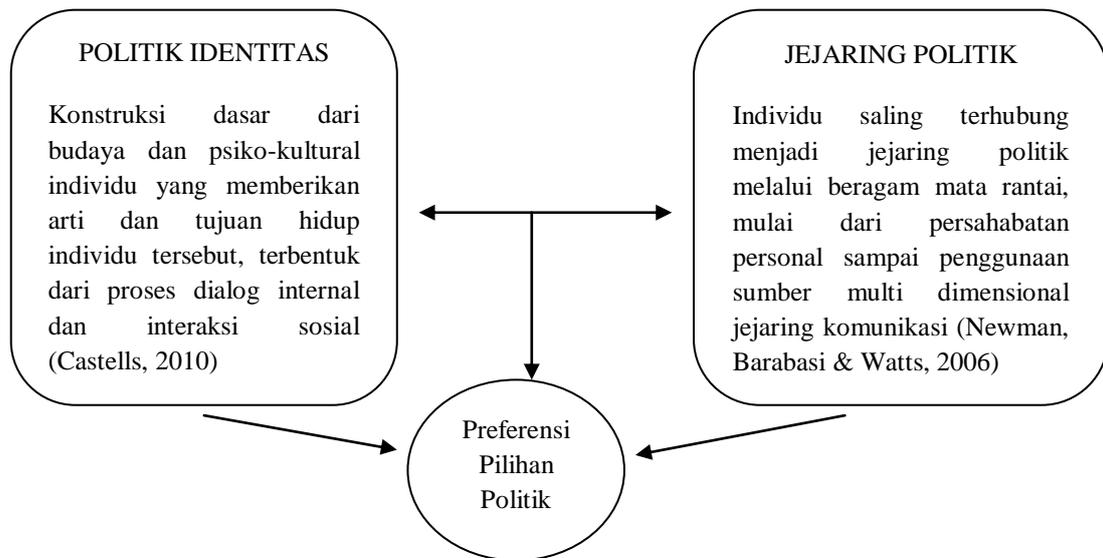
Anggota komunitas jejaring sosial melalui pertukaran informasi menjadi sadar akan kesenjangan antara realitas sosial yang dialami dengan realitas ideal dalam hal hubungan kekuasaan, khususnya antara identitas penguasa dominan dengan anggota komunitas yang berada pada posisi subordinat. Anggota komunitas jejaring sosial saling membangun kesadaran kritis bahwa realitas sosial yang dialami bukan realitas yang seharusnya. Posisi penguasa dominan dan subordinat tidak bersifat ideal, dimana komunitas membangun identitas perlawanan (*resistance identity*) terhadap penguasa dominan (Castell, 2010).

Pemaknaan akan adanya realitas ideal mendorong konstruksi identitas baru para komunitas jejaring sosial untuk melakukan aksi-aksi sosial yang ditujukan untuk mewujudkan realitas ideal yang selama ini dikonstruksi secara bersama (Castell, 2010). Dengan demikian, isi media sosial, dalam hal ini interaksi/ pemaknaan bersama akan mendorong munculnya kesadaran kritis yang merekonstruksi identitas komunitas. Berdasarkan pemaknaan akan realitas sosial, identitas komunitas perlawanan dan realitas serta identitas yang diproyeksikan, anggota komunitas jejaring sosial melakukan aksi untuk mewujudkan realitas sosial ideal yang dikonstruksikan di dalam dunia virtual.

Rumusan Masalah

Bagaimana pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menggunakan politik identitas dan jejaring politik untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012?

Kerangka Pemikiran



PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2012

demokrasi di daerah merupakan prasyarat munculnya demokrasi di tingkat nasional (Smith, 1998)

Tujuan

Sebagai informasi dan masukan bagi partai politik tentang politik identitas dan jejaring politik dengan menggunakan jejaring sosial melalui dunia virtual untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi dengan pendekatan kualitatif, dimana jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dalam koridor kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Creswell, 2010: 202).

Data yang dihasilkan akan diinterpretasikan sebagai penilaian dan masukan terhadap realitas tersebut,

seperti dikemukakan oleh Creswell (2010:264):

“qualitative research is interpretative research As such, the biases, values and judgment of the researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considered to be useful and positive”

Metode analisis penelitian menggunakan pendekatan interaksi simbolik (*Symbolic Interaction*) yang difokuskan pada perilaku peran, interaksi antar individu, serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati. Menurut Blumer (1986) interaksi simbolik menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar manusia, dimana manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan manusia lain maupun dengan dirinya sendiri. Blumer (dalam Veeger, 1993: 224-227) menyebutkan bahwa interaksi yang terbentuk secara simbolik di dalam masyarakat meliputi

bahasa, agama, ketentuan adat istiadat, objek sosial, lambang-lambang, dan berbagai pandangan.

Interaksi simbolik merupakan aktivitas ciri khas manusia, yaitu pertukaran simbol berdasarkan pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya melalui proses *self indication* (Blumer, 1986: 141). Proses ini merupakan proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut.

Pembahasan

Politik Identitas

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik, pertama kali disimposiumkan pada Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina tahun 1994 yang menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktek politik identitas dan menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Pemahaman politik identitas mengacu pada seorang filsuf poststrukturalis-postmodernis Perancis, Foucault (1991: 87-104) yang mengkritik konsekuensi-konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakannya pada “wacana-wacana yang tertindas” dari “wacana besar” yang mendominasi dan mengontrol, yang kemudian disebut politik identitas (*biopolitik*) seperti perbedaan-perbedaan tentang politik tubuh.

Bourdieu (1983) mengartikan identitas sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kategori ‘*native*’ (penduduk asli/pribumi), ‘*folk*’ (rakyat), atau ‘*lay*’ (awam/biasa) dimana kategori-kategori ini berkembang dan menyebar pada aktor masyarakat biasa sebagai pembeda dari kategori pengalaman terpisah yang dipergunakan oleh para analis sosial.

Tilly (1996: 1-17) mengkarakterisasikan identitas sebagai konsep yang tersamar, tetapi sangat diperlukan dan mendefinisikannya sebagai pengalaman aktor dengan kategori, ikatan, peranan, jejaring, grup atau organisasi yang terkait pada representasi publik melalui pengalamannya, dimana representasi publik sering mengambil bentuk dari sebuah narasi sejarah.

Sedangkan Appiah (2005: 65) mengkritik aspek identitas yang dibentuk berdasarkan identitas nasional, ras, agama, dan gender. Ia menganggap orang yang bereksistensi identitasnya merupakan orang yang membatasi hidupnya pada kriteria tertentu, kelompok tertentu, sehingga dengan mudah mendiskriminasi, menimbulkan kekerasan, dan mengakibatkan kejadian-kejadian katastrofik. Ia berusaha mengangkat klaim individualitas dan mempertahankan pandangan liberalism tentang kesetaraan manusia, tetapi juga menyadari adanya klaim soal perbedaan yang ada sejak lahir.

Suparlan (2004:25) mengatakan bahwa identitas atau jati diri muncul dan berada dalam interaksi seseorang yang mempunyai jati diri tertentu karena diakui keberadaannya oleh orang lain dalam suatu hubungan yang berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nampak bahwa seseorang atau sekelompok orang membutuhkan jati diri untuk digunakan dalam interaksi. Hal ini berarti bahwa dalam interaksi, pelaku mengambil suatu posisi. Selanjutnya berdasarkan atas posisi tersebut, si pelaku menjalankan peranannya sesuai dengan corak atau struktur interaksi yang berlangsung. Di dalam kenyataan sehari-hari, setiap orang akan memiliki lebih dari satu jati diri. Artinya, semakin banyak peranan yang dijalankan dalam kehidupan sosial seseorang, maka yang bersangkutan akan semakin banyak pula jati diri yang dimilikinya.

Politik identitas (*political of identity*) dibedakan dengan identitas politik (*political identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari.

Munculnya politik etnis diawali tumbuhnya kesadaran orang yang mengidentikan diri mereka ke dalam salah satu kelompok etnis tertentu, dimana kesadaran itu memunculkan solidaritas kelompok. Dari teoritisasi post-strukturalis kemudian post-modernitas yang mengkritik modernitas khususnya wacana etnis dalam konteks politik (*ethnic politic*) bahwa politik identitas etnis merupakan proses dari kegagalan modernitas dalam memenuhi janjinya.

Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi pasca pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU 12/2008, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*, seperti terjadi di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik ketika berhadapan dengan entitas politik lain (Haris, 1999).

Etnisitas berkaitan dengan lahirnya demokrasi di dunia pada permulaan abad ke-21. Maraknya proses demokrasi yang sejalan dengan politik desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan

hak kepada pemerintah daerah untuk memperoleh kebebasan dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah sendiri. Etnisitas yang menjadi ikatan yang sangat emosional dan mendalam telah melahirkan perjuangan kelompok-kelompok etnis tertentu dari dominasi etnis mayoritas. Etnisitas berkaitan pula dengan kebudayaan masing-masing yang memiliki ciri khas dari kelompok etnis tersebut, dalam kelompok tersebut terjadi keterikatan antara orang-orang dalam kelompok tersebut atau dikenal sebagai primordialisme. Sehingga tidak jarang keterikatan etnis ini dimanipulasi dan dijadikan alat atau kendaraan oleh kelompok elit dalam memperebutkan sumber kekuasaan, terutama di daerah yang penduduknya heterogen.

Kanchan Chandra dalam Ishiyama dan Breuning (2011;218) menyatakan:

“Those attributes acquired genetically (e.g. skin color, gender, hair type, eye color, height, and physical features), or through cultural and historical inheritance (e.g. the names, languages, places of birth and origin of one’s parents and ancestors), or acquired in the course of one’s lifetime as markers of such an inheritance (e.g. last name, or tribal markings). Further, it includes attributes believed to be associated with descent, which mean attributes around which a credible myth of association with descent has been woven, whether or not such an association exists in fact. The definition thus includes both a subjective and an objective element”.

Schermerhorn (1970) melengkapinya dengan mengatakan bahwa suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama, serta mempunyai fokus

budaya di dalam elemen simbolik yang menyatakan akan keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok.

Sedangkan Castells (2010:8) menyebutkan tiga bentuk pembangunan identitas:

1. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*), yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah memperoleh legitimasi untuk melakukan hal tersebut.
2. Identitas resisten (*resistance identity*), yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotip oleh pihak-pihak lain, sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya.
3. Identitas proyek (*project identity*), yaitu suatu identitas dimana aktor-aktor sosial membentuk identitas baru yang dapat menentukan posisi baru dalam masyarakat. Misalnya terjadi ketika aktivis feminisme berusaha

membentuk identitas baru perempuan, menegosiasikan ulang posisinya dalam masyarakat, akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan.

Klaus Von Beyme dalam Abdillah (2002:17) menganalisis karakter gerakan politik identitas dalam tiga tahap perkembangan; Pertama; tahap pramodern yang terjadi perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh, dimana terjadi mobilisasi ideologis oleh para elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang baru. Kedua; Pada tahap modern, gerakan muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi, terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada pembagian kekuasaan. Ketiga; perkembangan postmodern, munculnya gerakan berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, dan tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya. Dalam situasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan.

Model Politik Identitas Klaus Von Beyme

Model	Pola keterangan	Pola aksi	Tujuan gerakan
Pra modern	Perpecahan objektif (dimana ada perpecahan fundamental pasti ada gerakan sosial menyeluruh	Mobilisasi scr ideologis atas aspirasi pemimpin	Perampasan kekuasaan

Modern	Pendekatan kondisional (perpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi)	Keseimbangan mobilisasi dari atas & partisipasi dari bawah	Pembegalan kekuasaan
Postmodern	Gerakan dari dinamikanya sendiri. Protes muncul dari berbagai macam kesempatan individual. Tidak terdapat suatu perpecahan yang dominan	Kesadaran diri	Otonomi

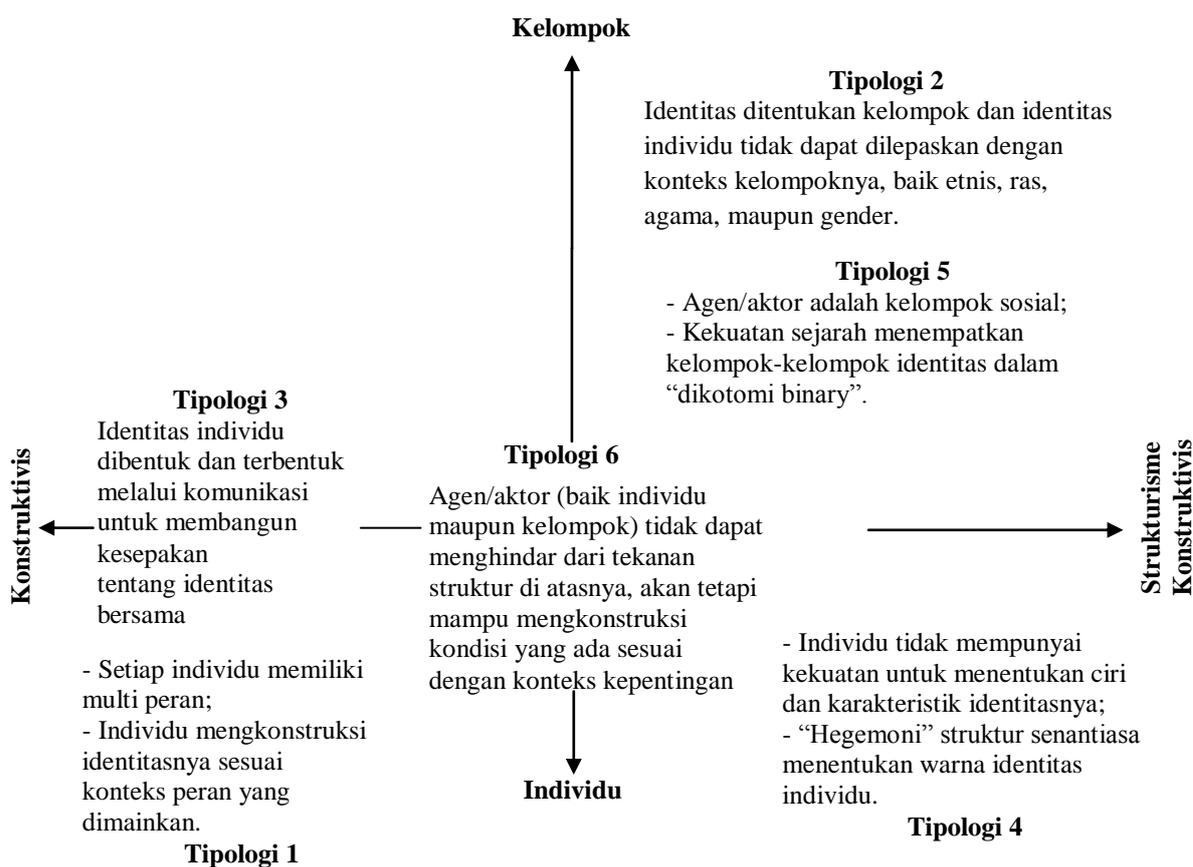
Sumber: Ubed Abdilah, 2002; 147

Pembentukan identitas senantiasa menitikberatkan pada pelaku (subyek) dan struktur (obyek), sehingga terdapat dua diskursus teoritik pembentukan identitas etnik. Pertama, kelompok teori strukturasi dan teori agen. Teori berperspektif strukturasi menitikberatkan pada peran struktur dalam menentukan tindakan aktor dan sebaliknya, teori berperspektif aktor menitikberatkan bahwa tindakan aktor

tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh struktur yang ada, melainkan aktor adalah individu atau makhluk yang bebas.

Kemudian diskursus teoritik kedua, berasal dari teori identitas dan pembentuknya. Kelompok teori ini, mendasari pada perbedaan level identitas, yakni individu, kelompok, dan komunikatif (Sjaf, 2012).

Tipologi Pelaku Politik Identitas



Jejaring Politik

Selain pendekatan primordialisme, calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah melakukan pendekatan melalui jejaring politik, yaitu penyatuan kekuasaan dan pengaruh dalam suatu kelompok yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan hubungan timbal balik para anggotanya. Bangunan utama dari jaringan adalah simpul (*nodes*) dan penunjang (*edges*). Simpul adalah tipikal aktor dan penunjang adalah tipikal yang mewakili hubungan di antara aktor. Penunjang mungkin tidak langsung (A dan B terhubung), atau langsung (A mengirim B sebuah perikatan), tidak bisa dinilai (ada atau tidak ada sebuah ikatan), atau bernilai (beragam nilai dimungkinkan). Newman, Barabási, and Watts (2006;2) mendefinisikan jejaring politik sebagai berikut:

“networks are ubiquitous: any set of interconnected nodes. The nodes can be individuals, groups, organizations, or states (as well as cells or Internet users); the connections or links can consist of personal friendships, trade flows, or valued resources.”

Teknologi komputer dan internet menjadi infrastruktur dari dibangunnya suatu kampung virtual bagi komunitas maya berupa situs jejaring sosial (*Social Network Sites/SNS*) sebagai media sosial. Di dalam komunitas berbasis orientasi politik, media sosial menjadi arena pemaknaan terhadap realitas kekuasaan. Melalui media sosial, komunitas mengaktifkan pesan-pesan simbolik untuk menegosiasikan identitas komunal terhadap legitimasi penguasa dominan serta membangun *counter power* terhadap penguasa dominan, dimana anggota komunitas jejaring sosial mulai mengadopsi suatu identitas komunal berdasarkan pemaknaan atas pengalaman bersama terhadap realitas sosial.

Jejaring membicarakan secara khusus tiga dimensi yang saling terhubung, yaitu: jumlah simpul, keluasan jaringan atau frekuensi interaksi antar jaringan, dan struktur jaringan yang membedakan pola koneksi di antara jaringan. Dimensi-dimensi ini, terutama struktur digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan efisiensi dari jaringan yang berbeda. Efisiensi adalah kemampuan menyebarkan informasi lintas jaringan secara cepat yang didefinisikan sebagai jumlah langkah atau jaringan di antara simpul, dimana sebuah pesan harus dijalankan sebelum mencapai target. Jadi, jaringan didefinisikan sebagai sekumpulan interkoneksi di antara simpul yang dibedakan oleh kualitas dan kuantitas koneksinya. seperti yang diungkapkan oleh Barabasi (2003;111-122):

“Efficiency is the ability to transmit information across the network “quickly,” with speed defined as the number of links between nodes through which a message must travel before reaching its target. Robustness, by contrast, is the ability of the network to function (i.e., transmit information) after the “failure” of a node or its removal from the network.”

Pendekatan politik pada jejaring diperlukan apabila simpul dapat diketahui oleh aktor untuk memformulasikan dan membuat perbaikan terhadap pilihan, hasil alternatif memiliki implikasi distribusional untuk simpul, dan bermacam simpul memiliki perbedaan di dalam kekuasaan dan pengaruhnya. Jika kondisi tersebut terjadi, maka simpul-simpul akan mencoba memanipulasi yang lainnya di dalam jaringan untuk menghasilkan keinginannya dan mensyaratkan pendekatan politik atau strategis dalam berinteraksi (Lake and Powell, 1999).

Dalam realitas jejaring sosial, simpul adalah orang atau organisasi yang dapat membuat lebih atau kurang pilihan informasi dalam pencarian definisi secara jelas. Hal ini berimplikasi bahwa simpul harus berhati-hati terhadap simpul lainnya yang memiliki insentif menunjukkan persyaratan berhasilnya jejaring. Bila fakta-fakta simpul sudah berkomitmen pada tujuan untuk jejaring yang dibentuk dan selalu menunjukkan tanggungjawab di dalam jejaring tersebut, diperlukan pula simpul-simpul lain juga berkomitmen dan bertanggungjawab.

Penunjukan pada banyak wajah dan munculnya kekuasaan di dalam jejaring mengilustrasikan bagaimana preferensi berbeda dan kapabilitas partisipan menekankan analisis untuk mempertimbangkan ulang kebijakan konvensional di dalam jejaring sebagai entitas yang relatif mutlak dan tanpa kekuasaan. Simpul-simpul yang terhubung paling baik memiliki dan menggunakan kekuasaan di dalam jejaring untuk mentransformasikan preferensi mereka sendiri kepada hasil selama pada saat yang bersamaan memberikan nilai tambah pada jejaring.

Jejaring komunikasi massa memberikan kekuasaan dalam jaringan yang mengikuti logika jaringan membuat kekuasaan, seperti dinyatakan oleh Castells (2009; 72-55) sebagai berikut:

“In a world of networks, the ability to exercise control over others depends on two basic mechanisms: (a) the ability to constitute network(s) and to program/reprogram the network(s) in terms of the goals assigned to the network; and (b) the ability to connect and ensure the cooperation of different networks by sharing common goals and combining resources while fending off competition from other networks by setting up strategic cooperation”

Pada pemilihan Gubernur (pilgub) DKI Jakarta tahun 2012 persoalan primordial juga mengemuka, dimana pasangan cagub dan cawagub Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli yang dikenal dengan sebutan Foke – Nara mengidentikkan diri mereka berdua sebagai putera daerah dari etnis Betawi yang berhak memimpin DKI Jakarta, sedangkan pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama yang disapa Jokowi – Ahok merupakan campuran dua kultur berbeda, Joko Widodo adalah orang Solo yang berasal dari etnis Jawa, dan Ahok adalah panggilan Basuki Tjahaja Purnama dari etnis Tiong Hoa yang berasal dari Belitung Timur, Sumatra, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2012 Berdasarkan Etnis

No. Urut	Nama Cagub – Cawagub	Etnis
1	Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli	Betawi
2	Hendardji Soepandji – Riza Patria	Jawa – Betawi
3	Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama	Jawa – TiongHoa
4	Hidayat Nur Wahid – Didik J. Rachbini	Jawa – Madura
5	Faisal Basri – Biem Benjamin	Sunda – Betawi
6	Alex Noerdin – Nono Sampono	Palembang – Jawa

Data diolah dari berbagai sumber, 2012

Jika dilihat dari perspektif etnisitas, putaran kedua pilgub DKI Jakarta tahun 2012 merupakan pertarungan 3 etnis, yaitu Betawi, Jawa, dan Tiong Hoa. Penduduk asli yang mendiami Sunda Kalapa, kemudian berubah menjadi Batavia adalah orang-orang Sunda (Muhadjir, 2001: 48–50). Kategori orang Betawi yang sebelumnya tidak pernah ada justru muncul pada tahun 1930 sebagai kategori baru dalam data sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dengan menyebutkan bahwa suku Betawi menjadi masyarakat mayoritas penduduk Batavia waktu itu (Muhadjir, 2001: 78).

Hal tersebut diperkuat oleh studi sejarah demografi penduduk Jakarta yang dirintis sejarawan Australia, Lance Casle yang pada April 1967 mengumumkan penelitiannya “*The Ethnic Profile of Jakarta*” di majalah Indonesia terbitan Cornell University, Amerika menyangkut asal-usul orang Betawi menyebutkan bahwa orang Betawi terbentuk pada sekitar pertengahan abad 19 sebagai hasil proses peleburan dari berbagai kelompok etnis yang menjadi budak di Batavia (<http://kompasiana.com> diakses 13 Juni 2012)

Perkembangan komposisi etnis di DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Etnis Di DKI Jakarta Tahun 1930, 1961 dan 2000

Etnis	1930	1961	2000
Jawa	11,01%	25,4%	35,16%
Betawi	36,19%	22,9%	27,65%
Sunda	25,37%	32,85%	15,27%
Tionghoa	14,67%	10,1%	5,53%
Batak	0,23%	1,0%	3,61%
Minangkabau	0,60%	2,1%	3,18%
Melayu	1,13%	2,8%	1,62%
Bugis	-	0,6%	0,59%
Madura	0,05%	-	0,57
Banten	-	-	0,25%
Banjar	-	0,20%	0,10%
Minahasa	0,70%	0,70%	-
Lain-lain	10,05%	1,35%	6,47%

Sumber: <http://www.kependudukancapil.go.id>

Secara agama, kota kosmopolitan DKI Jakarta ditopang oleh mayoritas Islam sebanyak 83%, Protestan 6,2%, Katolik 5,7%, Budha 3,5%, dan Hindu 1,2%

(<http://www.kependudukancapil.go.id>).

Secara realitas politik, pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama memperoleh dukungan minoritas sebesar 18% dari gabungan partai politik pengusungnya yang meraih kursi di DPRD DKI Jakarta, dimana dukungan tersebut hanya sedikit melebihi batas

minimal persyaratan Undang-Undang sebesar 15% seperti tercantum dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (2) bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara

sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Jumlah kursi dan dapil anggota DPRD provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengikuti UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pasal 23 ayat (2) huruf e. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan UU No.29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 12 ayat (4) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta.

Fenomena kemenangan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 memberikan indikasi adanya politik identitas pada proses pemilihannya. Apabila digabungkan

identitas Joko Widodo berasal dari etnis Jawa dengan Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan etnis Tiong Hoa, maka mereka memiliki dukungan identitas etnis sebesar 40,69% dibandingkan dengan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli yang keduanya merupakan orang Betawi dengan jumlah 27,65%.

Hal ini berbanding terbalik dengan realitas dukungan partai politik terhadap kedua pasangan Gubernur tersebut, dimana Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama didukung oleh 2 gabungan parpol, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra dengan 17 raihan kursi di DPRD DKI Jakarta atau setara 18%, dibandingkan dengan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli yang didukung oleh mayoritas parpol di DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 77 kursi atau 82% dari total 94 kursi DPRD DKI Jakarta, yaitu: partai Demokrat, PKS, Golkar, PPP, Hanura, PDS, PAN, dan PKB, seperti terlihat di dalam tabel berikut ini:

Komposisi Partai Politik Dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2012

NO	PASANGAN CALON GUBERNUR WAGUB	PENDUKUNG			JUMLAH	
		PARPOL	KURSI	%	KURSI	%
1	Fauzi Bowo Nachrowi Ramli	Demokrat	32	34	77	82
		PKS	18	19		
		Golkar	7	8		
		PPP	7	8		
		Hanura	4	4		
		PDS	4	4		
		PAN	4	4		
		PKB	1	1		
2	Joko Widodo Basuki Tjahaja Purnama	PDIP	11	12	17	18
		Gerindra	6	6		

Sumber: diolah dari <http://www.kpudkijakarta.go.id>

Selain pendekatan primodialisme, calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilgub DKI Jakarta tahun 2012 melakukan pendekatan dan mobilisasi

melalui jejaring politik dan jejaring sosial untuk mengoptimalkan dukungan dan simpati masyarakat DKI Jakarta dalam

memenangkan pemilihan Gubernur tersebut.

Pasangan Jokowi-Ahok berhasil menggalang dukungan dari para relawan yang mengkampanyekannya di media sosial dan para relawan ini tergabung dalam JASMEV (Jokowi-Ahok *Social Media Volunteers*) dengan memiliki 20 alamat jejaring sosial dan tiga *website* untuk mengenalkan tagline "Jakarta Baru".

Mayoritas relawan Jokowi-Ahok adalah pekerja, mahasiswa, dan buruh yang terkoordinir ke dalam tiga jaringan, yaitu:

1. Relawan Jakarta Baru terdiri dari 15.000 personel, mereka adalah tulang punggung Jokowi selama masa kampanye. Bekerja dengan sistem komando, saat kampanye mereka menggiring massa pendukung menjadi massa dalam kampanye demi kemenangan Jokowi. 15.000 relawan ini ditempatkan di tingkat RT, RW, kelurahan sampai kecamatan demi meraih massa.
2. Relawan Sekretariat Bersama, setelah pilgub selesai akan berganti nama menjadi koalisi rakyat dengan relawan berjumlah 60.000 yang selama masa kampanye bergerak meraih massa dari tingkat kecamatan sampai RT, berkampanye dari pintu ke pintu demi kemenangan Jokowi-Ahok.
3. Relawan Buruh Jakarta terdiri dari unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

dan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).

Relawan pendukung Foke-Nara tergabung dalam beberapa jaringan yang terbagi dalam kategori umum dan etnis, yaitu:

1. Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Forum Pemuda Betawi (FPB), Forum Pemuda NTT, Forum Masyarakat Andalas Bangkit (Format Andalas).
2. Satgas Anti Politik Uang (SAPU), *Blue Forces*, Barindo, Ampija, Brigade Nusantara, Komunitas Masyarakat Mandiri (KMM), dan Aliansi Pro Rakyat. (Data diolah dari berbagai sumber, 2012)

Aktivitas para relawan dari berbagai komunitas berhasil menarik simpati, dukungan, dan memberikan kontribusi nyata melalui jejaring politik dan sosial kepada para pemilih warga DKI Jakarta untuk memilih pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dengan perolehan suara di 5 wilayah administratif DKI Jakarta. Keberhasilan ekstensifikasi politik identitas dan jejaring politik melalui media virtual secara massif membuahkan hasil bagi kemenangan pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama merebut tampuk kekuasaan di DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012

URAIAN	JKT UTARA		P. SERIBU		JKT PUSAT		JKT TIMUR	
	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%
Fauzi B – Nachrowi R	300.12	40,96	8.794	73,45	249.427	49,30	611.366	46,79
Joko W – Basuki TP	432.71	59,04	3.178	26,55	256.529	50,70	695220	53,21
Suara Tdk Sah	10.678	1,44	144	1,19	9.773	1,89	22.358	1,68
Suara Sah & Tdk Sah	743.55	63,61	12.166	74,03	515.729	65,32	1.328.944	66,98
JML PEMILIH	1.168.988		16.367		789.489		1.999.040	

URAIAN	JKT SELATAN		JKT BARAT		JUMLAH	
	SUARA	%	SUARA	%	SUARA	%
Fauzi B – Nachrowi R	476.742	48,45	474.298	45,11	2.120.815	46,18
Joko W – Basuki TP	507.257	51,55	577.232	54,89	2.472.130	53,82
Suara Tdk Sah	16,628	1,66	15,415	1,44	74.996	1,65
Suara Sah & Tdk Sah	1.000.627	66,14	1.066.945	70,65	4.667.941	66,71
JML PEMILIH	1.512.913		1.510.159		6.996.951	

Sumber: <http://www.kpudkijakarta.go.id>

Karenanya, fenomena kemenangan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 merupakan pengukuhan terhadap hasil penelitian Saiful Mujani dan William Liddle (dalam Aspinal & Meitzner, 2010: 94) terkait dengan pemilihan Presiden yang menunjukkan bahwa partai politik dari mana calon Presiden berasal tidak berkorelasi secara signifikan dengan figur calon Presiden itu sendiri. Dengan kata lain, calon pemimpin, apakah Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati dipilih oleh rakyat lebih didasarkan atas figur kepemimpinan calon yang bersangkutan daripada afiliasi calon tersebut kepada partai politiknya.

Kesimpulan

Reformasi politik telah membawa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan di Indonesia, termasuk di daerah. Desentralisasi dan demokratisasi menjadikan daerah sebagai arena kekuasaan yang memiliki otonomi nyata untuk mengelola urusan rumah tangganya, termasuk dalam hal memilih kepala daerahnya secara langsung. Kondisi tersebut membuka pintu bagi masuknya politik identitas. Penggunaan politik identitas dalam praktek pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan keniscayaan, bahkan sengaja dimobilisasi menjadi jaringan yang bekerja secara politik untuk memenangkan kandidat yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah. Pasangan Jokowi – Basuki TP menjadikan politik identitas sebagai ikatan jaringan dengan mendistribusikan sumber-sumber informasi tentang keduanya. Ikatan jaringan terbentuk menjadi relawan kolektif tergabung dalam organisasi-organisasi politik dengan bekerja memiliki teritori yang tetap serta terikat di atas organisasi politiknya.

Politik identitas yang telah terbentuk dalam ikatan jaringan organisasi diakselerasi secara massif melalui jejaring politik di dalam media virtual untuk memengaruhi preferensi pilihan politik masyarakat DKI Jakarta dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan

pasangan Joko Widodo –Basuki Tjahaja Purnama memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 adalah kecerdikannya memadukan dan memanfaatkan politik identitas yang bekerja sebagai relawan dengan mengagregasikan dan mengartikulasikan jejaring politik terorganisir secara optimal. Kekuatan politik identitas dan jejaring politik yang tergabung dan terorganisir dalam JASMEV membuka peluang Joko Widodo untuk mengikuti kontestasi ke jenjang panggung politik nasional sebagai bakal calon Presiden dalam perhelatan pemilihan Presiden Tahun 2014.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*. Magelang: Indonesia Tera.
- Appiah, Kwame Anthony. 2005. *The Ethics of Identity*. New Jersey: Princeton University Press.
- Aspinal, Edward and Marcus Meitzner. 2010. *Problem of Democratization in Indonesia*. Elections, Institutions and Society Parit Panjang. Singapore: Iseas Publishing.
- Barabasi, Albert-Laszlo. 2003. *Linked: How Everything is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life*. New York: Plume.
- Bourdieu, Pierre. 1983. *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wong.
- Blumer, Herbert. 1986. *Symbolic Interactionism; Perspective, and Method*. London: University Of California Press Barkeley Los Angeles.
- Castells, Manuel. 2009. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.

- _____, 2010. *The Power of Identity 2nd Edition*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 1991. Governmentality in Graham Burchell et al., editors, *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Book Inc. versi Indonesia dengan judul *Tafsir Kebudayaan*, oleh Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1992.
- Hall, Stuart. 1992. The Question of Cultural Identity. Dalam S. Hall and McGrew (eds). *Modernity and Its Futures*. Cambridge: Cambridge Polity Press and Open University.
- Haris, Syamsuddin (ed.). 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga.
- Heaney, M. T., & Mc Clurg, S. D. 2009. *Social Networks and American politics: Introduction to The Special Issue*. American Politics Research, 37, 727-741.
- Hill, David T. and Krishna Sen. 2005. *The Internet in Indonesia's New Democracy*. New York: Routledge.
- Ishiyama, John T. dan Marijke Breuning. 2011. *21st Century Political Science. A Reference Handbook*. California: SAGE Publications Inc.
- Lake, David A., and Robert Powell. 1999. *Strategic Choice and International Relations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lay, Cornelis. 2006. *Involusi Politik: Esei-Esei Transisi Indonesia*. Yogyakarta: S2 PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM.
- Liddle, William. 1972. Ethnicity and Political Organization: Three East Sumatra Cases. Dalam *Culture and Politics in Indonesia*. Claire Holt (Editor) Cornell University. London: Palgrave.
- Muhadjir. 2001. *Bahasa Betawi: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. 2001. *Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities*. Journal of Asian Studies. Volume 32, Nr. 2, October.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Schermerhorn, R.A. 1970. *Comparative Ethnic Relations: A Framework for Theory and Research*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Sjaf, Sofyan. 2012. Pemberntukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik Lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6, No.2. September: 170-178
- Smith, B.C. 1998. *Local Government and Transition to Democracy: A Review Article*, Public Administration and Development, 18: 85-92.
- Suparlan, Parsudi. 1980. *The Javanese in Suriname*. (Disertasi). University of Illinois Urbana, Chicago, USA.
- Tilly, Charles. 1996. *Citizenship, Identity and Social History*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Varshney, Ashutosh. 2003. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New Haven and London: Yale University Press.
- Veeger, KJ. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.